

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(Studi di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

NAJMAH HAYATI

NPM : 1621020440

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(Studi di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

NAJMAH HAYATI

NPM : 1621020440

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing 1 : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H

Pembimbing 2 : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Pengetahuan masyarakat akan bahaya pertambangan terhadap batu sungai yang berlebihan juga harus disosialisasikan. Peran pemerintahan sebenarnya sangat penting, karena jika masyarakat tidak diberikan arahan terhadap bahaya lingkungan akibat pertambangan yang berlebihan dari batu di sungai maka kegiatan pertambangan akan semakin marak berkembang dan tidak terkendali. Penelitian ini difokuskan pada Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Adapun yang menjadi permasalahannya adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Pesawaran. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Pesawaran menurut Fiqh Siyasah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *Deskriptif Analisis*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, pengolahan data melalui tahap editing dan sistematis. Analisis data dilakukan secara *kualitatif*.

Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum dilaksanakan dengan baik karena pemerintah daerah bersama pemerintah desa hanya memberikan sosialisasi dan teguran kepada sekelompok masyarakat yang melakukan penambangan tanpa adanya izin usaha melakukan penambangan dari pemerintah setempat di sungai Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, namun teguran yang diberikan tidak diindahkan oleh sekelompok masyarakat yang melakukan penambangan pasalnya mereka masih melakukan penambangan dengan alasan kebutuhan ekonomi serta bayaran yang cukup besar. Adapun Analisis Fiqh Siyasah bahwa sekelompok masyarakat yang melakukan penambangan batu sungai di desa Padang Manis tanpa memiliki izin dari pemerintah setempat dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak mengikuti aturan pemimpin atau *ulil amri*. Dalam hukum islam perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram dan hukumnya dosa karena mendatangkan *mudharat*, dalam ushul fiqh hal ini tidak mendapatkan *maslahat*, padahal sudah cukup jelas Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul serta *ulil amri* di antara kamu. Selanjutnya dalam Siyasah Dusturiyah cukup jelas bahwa pemerintah memegang kendali dan bertanggung jawab penuh atas pembentukan kebijakan dalam urusan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Pesawaran, tetapi pemerintah tidak melaksanakan kebijakannya dengan baik atau tidak amanah padahal dalam HR.Bukhori nomor 6617 Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan bahwa :

Nama : Najmah Hayati
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Manis, 18 Oktober 1999
NPM : 1621020440
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi di desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 November 2020

Najmah hayati
NPM.1621020440



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Najmah Hayati

NPM : 1621020440

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi di desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003

Mengetahui

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)**

Frenki, M.Si

NIP. 198003122009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi di desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)** disusun oleh Najmah Hayati, NPM : 1621020440, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

Penguji I : Dr.Susiadi AS., M. Sos.I.

Penguji II : Dr.H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Penguji III : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Dekan,



Dr. H. Kholiddin, M.H.

NPM 16210221993031002]

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”

(Q.S Al-A'raf (7) :56)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku, Ayah M.Yasin Dahri dan Ibu Artati terimakasih atas jasa pengorbanan serta doa, selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil serta membimbingku dengan kasih sayang dan selalu mendengarkan keluh kesah selama penulis melaksanakan studi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang untuk Ayah dan Ibu. Aamiin yarobbal alamin.
2. Kakakku A.Fauzan Fitra Hilal Arya dan Shinta Emelia serta adikku Satria Hakim Arya. Terimakasih selalu memberikan dukungan serta nasehat yang tiada hentinya.
3. Hadi Futra terimakasih atas waktunya selalu menemani penulis dari awal kuliah sampai menyelesaikan tugas akhir, dan selalu memberikan dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Najmah Hayati lahir di Padang Manis pada tanggal 18 Oktober 1999, Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M Yasin Dahri dan Ibu Artati, Penulis mengawali pendidikan pada :

1. TK Harapan Kita di Komplek PTPN VII Waylima diselesaikan pada Tahun 2004.
2. SDN 1 Padang Manis diselesaikan pada Tahun 2010.
3. Mts Negeri 1 Kedondong Pesawaran diselesaikan Tahun 2013.
4. SMAN 1 Gedong Tataan di selesaikan Tahun 2016.
5. Tahun 2016 penulis baru melanjutkan jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat pemahaman, kesehatan, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NO 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA, Studi Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran” sebagai prasyarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, dan fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Bapak Frenki, M.Si, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I serta staf dan jajarannya.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.AG., M.H, yang begitu

sabar dan banyak meluangkan waktu untuk memberi masukan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pembimbing II Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I , yang begitu sabar dan banyak meluangkan waktu untuk memberi masukan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syariah yang selama ini telah memberikan pelajaran, masukan dan motivasi kepada penulis.
7. Kepala Desa Padang Manis Bapak Hendri Kurniawan beserta Kaur dan Kesra yang telah memberikan data dan keteranganya selama penulis melakukan penelitian.
8. Teman-Teman keluarga besar Siyasah I atas cerita, doa, serta kebersamaannya selama ini dan insyaallah sampai seterusnya.
9. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa penulis banggakan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Tetapi penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan kiranya dapat membantu penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini dan tak lupa penulis juga berharap para pembaca memberi masukan berupa saran sehingga penelitian ini akan lebih baik di masa mendatang.

Bandar Lampung, 26 November 2020
Penulis,

Najmah Hayati
NPM. 1621020440

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	13
1. Siyasah Dusturiyah dan Siyasah Tanfidziyah	13
2. Alam dan Lingkungan Hidup dalam Islam	28
3. Perda Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	38
B. Tijauan Pustaka	53

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Padang Manis	57
B. Peran Pemerintah Terhadap pertambangan Batu Sungai di Desa padang Manis	65

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di desa Padang Manis	70
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi peraturan daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di desa Padang Manis	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Urutan Jabatan Sejarah Kepala Desa Padang Manis	58
2. Urutan Jabatan Kasi-Kaur Desa Padang Manis	58
3. Urutan Jabatan Kepada Dusun Desa Padang Manis	59
4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Padang Manis	60
5. Mata Pencarian Penduduk Desa Padang Manis.....	61
6. Tata Guna Tanah Desa Padang Manis	62
7. Sarana Dan Prasarana Desa Padang Manis.....	62
8. Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Padang Manis.....	63



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (Studi di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten pesawaran)**”, dan untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda maupun yang memiliki makna ganda dalam memandang masalah ini maka perlu diberikan penegasan judul. Untuk itu ada baiknya mengartikan serta memahami istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹
2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 adalah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD Kabupaten Pesawaran dengan persetujuan bersama kepala daerah Kabupaten Pesawaran Tentang

¹Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 4.

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ada di Kabupaten Pesawaran.²

3. Pertambangan mineral adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang yang berupa benda padat homogen bersifat takorganik yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi kimia tertentu, jumlahnya yang sangat banyak, misalnya tembaga, emas, intan, dan barang tambang.³
4. Batubara adalah bahan bakar hydro-karbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh temperatur serta tekanan yang berlangsung sangat lama.⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapatlah ditegaskan bahwa yang dimaksud judul proposal skripsi ini adalah Analisis fiqh siyasah tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 tahun 2011 terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Desa Padang Manis.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

²Dr. Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h. 104.

³Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 Ayat 15.

⁴*Ibid.*, h. 39.

1. Alasan Objektif

Fenomena penambangan batu sungai yang ada di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran ini sudah seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah setempat. Karena penambangan itu sangat merusak kelestarian dan ekosistem sungai di Desa Padang Manis. Yang tadinya batu batu tersebut menjadi penahan disaat aliran air sungai sangat deras sekarang tidak ada lagi penahan sehingga fenomena banjir menjadi sering terjadi di saat aliran air sungai sangat deras.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul skripsi ini sangat relevan pembahasannya dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Referensi yang dibutuhkan sebagian besar mudah diakses oleh peneliti.

C. Latar Belakang Masalah

Sungai pada dasarnya adalah sebagai sumber air yang sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional. Di dalam sungai terdapat berbagai macam kekayaan sumber daya alam salah satunya berupa batu sungai.

Batu merupakan bahan galian yang banyak dipakai sebagai bahan bangunan. Seiring meningkatnya pembangunan di era sekarang maka kebutuhan akan batu ikut meningkat sehingga penambangan terhadap batu baik yang sifatnya legal atau ilegal juga terus meningkat.⁵

⁵Hs, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers,2012). h. 76.

Selain itu pengetahuan masyarakat akan bahaya pertambangan terhadap batu sungai yang berlebihan juga harus disosialisasikan. Peran pemerintahan sebenarnya sangat penting, karena jika masyarakat tidak diberikan arahan terhadap bahaya lingkungan akibat pertambangan yang berlebihan dari batu di sungai maka kegiatan pertambangan akan semakin marak berkembang dan tidak terkendali. Pengetahuan warga negara dalam hal ini sangat penting karena menyentuh lingkungan mengenai sebab akibat dari adanya pertambangan. Hak-hak warga negara atau masyarakat harus bisa terjaga keutuhannya tanpa terkecuali masyarakat yang menginginkan kelestarian lingkungan untuk masa yang akan datang.

Masyarakat sekitar merasa bahwa adanya penambangan batu sungai khususnya di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran meresahkan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai karena penambangan batu sungai di Desa Padang Manis sudah pada titik mengkhawatirkan sebab akibat dari aktivitas penambangan tersebut salah satu dampaknya adalah rusaknya kelestarian sungai yang tadinya terdapat batu batu besar yang mengindahkan pemandangan sungai sekaligus menjadi penahan aliran air sungai disaat arus sungai sangat deras sekarang sudah tidak ada lagi batu batu besar yang menahan arus sungai disaat hujan besar akibat adanya penambangan batu sungai tersebut. Alhasil dari adanya penambangan tersebut tahun 2017 lalu terjadilah bencana banjir besar yang menimpah Desa Padang Manis akibat luapan air sungai di Desa Padang Manis.

Dalam Fatwa MUI tanggal 26 mei 2016 tentang Hukum pertambangan ramah lingkungan disebutkan bahwa pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya haram dan Didalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ (الأعراف: ٥٦)

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi dengan cara apapun dari macam-macam kerusakan, setelah Allah memperbaikinya dengan pengutusan para rasul dan memakmurkannya dengan amal ketaatan kepada Allah. Dan berdoalah kepadanya dengan keikhlasan doa baginya, dengan diiringi rasa takut terhadap siksaannya dan berharap akan pahalanya. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan pertambangan ada tiga, yakni pengaturan (ragulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengatuan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara di antara aspek lainnya.⁷

125 ⁶Departemen Agama, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung:CV.Dipenogoro, 2009) h.

⁷Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 45

Hal inilah yang menarik penulis untuk membahas skripsi yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten pesawaran).

D. Fokus Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak sejauh mana peran pemerintah dalam mengatur penambangan yaitu analisis fiqh siyasah tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Pesawaran ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap penambangan batu sungai di Desa Padang Manis Kecamatan WayLima Kabupaten Pesawaran
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Penambangan batu sungai di Desa Padang Manis Kecamatan WayLima Kabupaten Pesawaran

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan, khususnya mengetahui peran pemerintah dalam mencegah penambangan batu sungai di Kabupaten Pesawaran, baik dalam tataran hukum positif maupun hukum islam.
- b. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.

G. Signifikasi Penelitian

Kegunaan penelitian :

1. Sebagai pengembang wawasan tentang pentingnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran.

2. Memberi masukan kepada lembaga pemangku kebijakan yang bersangkutan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
3. Bagi penulis merupakan suatu wawasan ilmiah dan pemikiran penulis dalam dunia hukum tentang implementasi suatu kebijakan.

H. Metode Penelitian

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode ialah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah, serta mencapai hasil yang optimal.⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis *Penelitian Lapangan (Field Research)*, yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.⁹

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.¹⁰ Kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian

⁸Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 10.

⁹Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2.

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.

tentang Penambangan batu sungai di wilayah lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Pesawaran.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari responden mengenai penambangan batu sungai di wilayah pertanian masyarakat. Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari masyarakat di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. Adapun yang dijadikan sumber bagi data primer adalah Pemerintah Desa padang Manis, penambang batu sungai.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan yang dapat menunjang pembahasan dalam skripsi ini. Sumber data sekunder umumnya berupa Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, kitab-kitab, undang-undang, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan.

3. Metode Pengumpulam Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

- a. Interview atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.¹¹
- b. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.”¹² Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah Pemerintah Desa Padang Manis dan penambang yang berada di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus

23. ¹¹V. Wiratna Sujrweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka barupress. 2014), h.

¹²Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 74.

sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti antara lain : Kepala Desa Padang Manis dan Unsur Kesekretariatan (3 Orang), dan penambang batu sungai di Desa Padang Manis (5 Orang)

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengkorek siapakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹³

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisis data tersebut, adapun metode analisis data yang dipergunakan Metode Analisis Data Kualitatif,

¹³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h.126

yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja,¹⁴ analisis secara kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti”.¹⁵

Adapun pendekatan berfikir menggunakan metode Induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁶ Data dan fakta hasil pengamatan lapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisis data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi (benar terjadi).

78. ¹⁴Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), h.

¹⁵*Ibid.*, h. 79.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rienka Cipta, 2006), h. 42.

¹⁷Nana Sudjana, *Prosedur Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 2001), h. 7.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian teori

1. Siyasah Dusturiyah dan Fiqh Tanfidziyah

a. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁸

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan

¹⁸Dr.Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 77.

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁹

Siyasah dusturiyah yang merupakan kontribusi Islam dalam sistem politik mempunyai prinsip penting mengenai pembentukan pengaturan perundang-undangan. antara lain, mengacu pada prinsip nash dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*, prinsip nash yang ditegaskan oleh munawir sjadzali dalam karyanya “Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”, mencakup:²⁰

- 1) Prinsip kedudukan manusia dimuka bumi
- 2) Musyawarah
- 3) Ketaatan kepada pemimpin
- 4) Keadilan
- 5) Persamaan
- 6) Hubungan baik antar ummat beragama.

Sedangkan prinsip *Jalb al-mashalh wa Dar al-mafasid* menurut Muhammad Iqbal dalam karyanya “Fiqh Siyasah; Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam”, tentu perlunya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.²¹

¹⁹Prof.H.A.Djajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 47.

²⁰Munawwir Sjadjali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 34.

²¹Dr.Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 4.

Hal ini terangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa prinsip islam yang diletakkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).²²

Prinsip-prinsip tersebut telah benar menjadi rujukan di negara-negara Islam, namun tidak menutup kemungkinan negara-negara Islam juga mengambil (mengadopsi) sumber lain sebagai sumber hukum negaranya. Seperti contoh yang dijelaskan oleh Munawir Sjadzali bahwa negara Maroko dan Yordania menganut prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi terkait bidang perdata yang lain dan pidana selain daripada masalah perkawinan, pembagian warisan dan pewakafan, fiqh Islam merupakan salah satu sumber utama di samping sumber lain, termasuk barat.

b. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

- 1) Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum

²²Syekh Abdul, Wahab, Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rinika Cipta, 1993), h. 68.

lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²³

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah Surat Al-Ahzab ayat 72 :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ (الأحزاب : ٧٢)

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh."²⁴

- 2) Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi.

Adapun Hadis yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَمَّدُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ

²³Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 51.

²⁴Almumayyaz, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h 186.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'aim) telah menceritakan kepada kami (Abul Asyhab) dari (Al Hasan), bahwasanya Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin yasar ketika sakitnya yang menjadikan kematiannya, lantas (Ma'qil) mengatakan kepadanya; 'Saya sampaikan hadist kepadamu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga."²⁵

3) Dalam hukum Islam, ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta, maka ijma" tersebut dinyatakan batal.²⁶

4) Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku

²⁵TafsirQ, "Hadist Bukhari Nomor 6617" (On-line) Tersedia di: <https://tafsirq.com/en/hadits/bukhari/6617> (29 September 2020).

²⁶Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islam* (Damsyiq: Dar Al Fikr, 2005), h. 574.

tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas Biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.²⁷

c. Ruang Lingkup dan Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁸

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam

²⁷ *Ibid.*, h. 581.

²⁸ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.47.

di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁹

Apabila dilihat dari sisi lain Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat dibagi kepada:³⁰

- 1) Bidang *Siyasah Tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *Bai'ah*, *Wuzarah*, *Waliy Al-ahdi*, dan lain-lain.
- 2) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 3) Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha

²⁹*Ibid*, h.47.

³⁰*Ibid*, h.48.

negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'î (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *Ahl Al-hall Wa Al-aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Al-Tanfidiyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang

tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahata.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha''iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha''* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al- mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³¹

d. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

1) Pengertian Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dustûri*. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), h. 157-159.

(masjusi), setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³²

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam

³²Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 25.

konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh perumusan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen di bagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

2) Sejarah Munculnya Konstitusi

Menurut ulama Fiqh Siyasah pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat dengan demikian, hubungan antara kedua pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan di masing-masing negara. Akan tetapi, karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang

hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya karena pemerintahan memegang kekuasaan tidak jarang pemerintahan bersifat absolut otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan secara absolut tersebut.³³

3) Perkembangan Dalam Islam

Sumber tertulis utama pembentukan undang-undang dasar dalam Islam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, karena memang bukan buku undang-undang, Al-Quran tidak merinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Al-Quran hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak banyak. Ayat-ayat yang masih global ini kemudian dijabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takdir atau ketetapan.

Namun demikian, penerapannya bukan “harga mati”. Al-Quran dan Sunnah menyerahkan semuanya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konstek sosial masyarakatnya. Dalam hal ini dasar-dasar hukum Islam lainnya,

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 179.

seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan '*Urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al- Quran dan Sunnah.

Nabi Muhammad SAW, dalam kedudukannya sebagai penjelas terhadap Al-Quran, pada tahun kedua hijrah ke Madinah telah mengundang Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas Negara Madinah yang heterogen, seperti kaum Muhajirin (penduduk Mekkah yang hijrah bersama Nabi ke Madinah), kaum Anshar (warga atau penduduk asli Madinah), kaum Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk Islam tapi menyatakan diri tunduk kepada Nabi. Dalam piagam Madinah ditegaskan bahwa umat Islam, walaupun berasal dari berbagai kelompok adalah merupakan suatu komunitas. Piagam ini juga mengatur pola hubungan antara sesama komunitas muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu saling menasihati dan menghormati kebebasan menjalankan agama.³⁴

Isi penting dari Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. PiagamMadinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial

³⁴Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 15-16.

politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun keberadaan piagam ini tidak dapat bertahan lama, karena di hianati sendiri oleh suku suku yahudi Madinah. Sebagai balasan atas penghianatan tersebut, Nabi SAW menghukum mereka, sebagian diusir dari Madinah dan sebagian lagi dibunuh. Setelah itu nabi SAW tidak lagi mengadakan perjanjian tertulis dengan kelompokkelompok masyarakat Madinah. Pola hubungan masyarakat Madinah langsung dipimpin Nabi berdasarkan wahyu Al- Quran.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi dibedakan menjadi tiga; pertama, negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan memberlakukan hukum fiqh secara apa adanya. Contoh tipe negara ini adalah Arab Saudi. Kedua, negara yang menanggalkan sama sekali Islam dari dasar negaranya (sekuler) dan mengadopsi sistem hukum negara negara Barat dalam konstitusinya, seperti yang dilakukan Turki pasca khilafah Usmani. Ketiga, negara yang mencoba menggabungkan Islam dan sistem hukum Barat, contoh negara ini adalah Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Indonesia.

e. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah adalah bidang ilmu dari Fiqh Siyasah yang berdasarkan trimonologi fiqh disebut sebagai lembaga penengah dan

³⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 181-182.

pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-'aqd*) lembaga ini adalah lembaga yang mengurus pelaksanaan undang-undang dan hukum yang relevan dengan situasi untuk kemaslahatan hidup manusia dan sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut.

Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-kharuj* (Dewan pajak), *diwan al-ah'das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, *al-maududi* menyebutnya sebagai amir dan dikesempatan lain sebagai khalifah.

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah, umat islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa pelanggaran.

Wewenang atau tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)³⁶

2. Alam dan Lingkungan Hidup dalam Islam

a. Alam

Alam semesta merupakan sumber ilmu pengetahuan yang paling berharga di jagad ini, hampir segala ilmu pengetahuan bermula dari alam semesta, melalui berbagai kajian dan penelitian maka muncul berbagai macam interpretasi yang kemudian menjadi teori-teori yang tentu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Banyak diantara mereka yang telah melakukan penelitian dan telah menghasilkan berbagai teori, tetapi penelitian terhadap alam semesta ini tidak pernah tuntas, karena alam ini tidak henti-hentinya memberikan ilmu pengetahuan pada manusia, sehingga bagi peneliti selalu mendapat tambahan ilmu baru dalam setiap melakukan penelitian, hal ini senada dengan apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 109 :

³⁶Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007) h. 273.

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ

جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ (الكهف: ١٠٩)

“Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).”³⁷

Fenomena alam semesta merupakan bagian di antara bahan penelitian bagi manusia, telah banyak teori-teori dari fenomena alam ini, karena fenomena alam telah memberikan informasi kepada manusia dalam setiap saat, bukan hanya setiap detik, bahkan lebih kecil dari detik pun alam ini telah memberikan informasi kepada manusia, lebih-lebih tiap jam, hari, bulan, bahkan tiap tahunnya.

b. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan Tuhan yang maha esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-undang terhadap semua bentuk peraturan

³⁷Almumayyaz, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 157.

mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti dai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Emil salim mendefinisikan lingkungan hidup sebagai Segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Hal serupa dikemukakan oleh Soemarwoto, namun dalam perspektif yang berbeda, bahwa Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu todak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya.

Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pemeliharaan lingkungan. Sebagai konsekuensi ditundukkannya segala elemen lingkungan kepada manusia, maka selanjutnya manusia dituntut untuk berinteraksi dengan lingkungan secara baik sesuai dengan hukum-hukum yang sudah digariskan oleh Allah Swt yaitu dengan melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata.

Masalah Lingkungan Hidup Sesungguhnya sumber yang menimbulkan permasalahan lingkungan ialah ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak memedulikan keseimbangan dan keselarasan

lingkungan. Manusia yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan. Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan. Tidak jarang terjadi manusia yang melakukan tindakan *over* eksploitasi karena didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan materi.³⁸

Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia.

1) Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor alam Bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Yaitu peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain; letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam tersebut yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup.

2) Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup, yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi

³⁸Pande Made Kutanegara, *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004), h. 100.

berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup seperti :³⁹

a) Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan

Pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. Kemajuan teknologi produksi dalam eksploitasi atau penambangan batu bara, minyak bumi, bijih besi, emas, timah, bauksit, dan sumber daya alam lainnya, telah mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Eksploitasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam, meningkatnya frekuensi tanah longsor, terbentuknya terowongan, waduk atau genangan air yang tidak dikehendaki, serta gangguan terhadap kehidupan satwa liar. Pengolahan, pengangkutan, dan proses lebih lanjut bahan yang dieksploitasi itu juga akan mencemari tanah, air, dan udara.

b) Industrialisasi

Sejak revolusi industri, kebutuhan akan produk-produk yang dibutuhkan manusia kian meningkat. Pada awalnya, kebutuhan untuk menggerakkan mesin-mesin industri digunakan kayu sebagai bahan bakar. Untuk itu maka penggundulan hutan tidak bisa dihindari. Hal tersebut diperparah lagi, karena tidak diimbangi dengan penerapan reboisasi yang baik, dan kondisi

³⁹Yosef Anata Christie, “*Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan*” (Jakarta : Gramedia, 2013), h. 6.

tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Dengan ditemukan mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar minyak bumi lebih mempercepat proses industrialisasi. Percepatan proses industrialisasi juga berpengaruh dengan meningkatnya eksplorasi minyak bumi. Seiring dengan meningkatnya proses industrialisasi, berdampak pada pencemaran terhadap lingkungan seperti Pencemaran udara, Pencemaran air dan Kebisingan.

Industri kimia dan industri yang menggunakan bahan-bahan kimia merupakan salah satu jenis industri yang berpotensi untuk mencemari lingkungan. Hal tersebut dapat terjadi karena limbahnya tidak dapat dengan mudah didegradasi dibandingkan dengan senyawa-senyawa lainnya.

c) Transportasi

Transportasi pada ahirnya merupakan tuntutan dan bukan sekedar keinginan. Tranportasi dibutuhkan untuk mendukung mobilitas penduduk dari tempat tinggal ke kerja atau dari satu tempat ke tempat lain. Ketika tuntutan transportasi menjadi cukup tinggi, peluang terjadinya polusi udara dan emisi juga meningkat. Terlebih bahan bakar adalah jenis sumber daya tidak terbarui sehingga apabila tidak ada kepedulian dalam penggunaannya, kemungkinan punah akan sangat besar.⁴⁰

d) Sampah

⁴⁰Pande Made Kutanegara, *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004), h. 142.

Sampah yang dibuang di sembarang tempat dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain menimbulkan penyumbatan pada saluran drainase dan saluran air hujan sehingga mengakibatkan banjir, mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan dan menjadi sumber penyakit serta dampak negatif lainnya.⁴¹

Seperti yang kita ketahui dalam Al-Qur'an bahwa banyak kerusakan di muka bumi ini akibat ulah tangan manusia. Firman Allah SWT :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ (الرّومى: ٤١)

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”⁴².

Makna dari ayat diatas adalah apabila manusia mengurus dan mengelola alam lingkungan dan berbagai kekayaan yang tersedia ini dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya maka keadilan itu akan dinikmati manusia secara awet dan lestari. Tetapi sebaliknya, apabila pengurusan alam ini tidak baik, boros dan serampangan, dan tidak adil serta tidak seimbang dalam melakukan eksplorasi melewati batas dalam

⁴¹*Ibid.*, h. 47-48.

⁴²Almumayyaz, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h.

memperlakukan alam lingkungannya, niscaya azab Allah dan malapetaka akan datang kepada manusia dan itu tidak lain akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri.⁴³

1) Tanggung Jawab Manusia terhadap Lingkungan Manusia harus sadar bahwa kita semua merupakan bagian dari ekosistem. Manusia sadar bahwa hakikat kehidupan dan kelangsungan eksistensinya sangat bergantung pula pada sikap manusia dalam mempengaruhi lingkungannya. Karena itu manusia dalam tingkah lakunya harus selalu menjaga agar keseimbangan sistem ekologi tidak terganggu. Lingkungan dijaga agar keharmonisan dan keseimbangannya lestari. Dengan begitu terjamin pula kelangsungan hidup dari semua organisme hidup lain, termasuk manusia. Dalam hal ini manusia berperan sebagai “*pelestari lingkungan*”. Manusia mempunyai kesadaran dan tanggung jawab atas tingkat kualitas lingkungan hidup. Kini manusia berkeyakinan bahwa makin tinggi kualitas lingkungan, makin banyak manusia dapat mengambil keuntungan, dan makin besar pula daya dukung lingkungan hidup untuk manusia. Karena itu dengan segala usaha serta penggunaan alat teknologi modern yang dimilikinya, manusia, sambil memanfaatkan sumber daya alam lingkungan, juga meningkatkan kualitas lingkungannya.⁴⁴ Alam sendiri mempunyai makna sebagai penopang kehidupan, maka alam patut dihargai dan diperlakukan dengan baik.

⁴³Drs. Kaelani, HD, MA, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 137.

⁴⁴Koes. Irianto, *Ekologi Kesehatan (Health Ecology)* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 101.

Alam sangat penting perannya bagi seluruh kehidupan, maka ia berada bukan hanya untuk manusia melainkan untuk seluruh ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga dan memelihara alam untuk kepentingan bersama atau kepentingan semua.⁴⁵ Prinsip dalam rangka mewujudkan tanggung jawab terhadap lingkungan yang relevan untuk lingkungan hidup meliputi:⁴⁶

- a) Sikap Hormat terhadap Alam (*Respect for Nature*)
- b) Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Responsibility for Nature*)
- c) Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*)
- d) Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam (*Caring for Nature*)
- e) Prinsip “No Harm”
- f) Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam.

- 2) Pelestarian Lingkungan Setiap kegiatan atau proyek pembangunan memerlukan lokasi dan lokasi ini dapat merupakan suatu ekosistem atau bagian suatu ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan akan mengakibatkan dampak atau gangguan terhadap komponen-komponen ekosistem itu (lingkungan). Artinya, dampak proyek pembangunan tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan secara total. Upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif sehingga

⁴⁵Hadi S. Alikodra, *Konservasi SumberDaya Alam dan Lingkungan* (Jakarta: Prenamedia, 2012), h. 76.

⁴⁶Kus Dwiyatmo B, *Pencemaran lingkungan dan Penanganannya* (Jakarta: Prenamedia, 2010), h. 4-9.

kerusakan dan pencemaran yang timbul dapat ditoleransi oleh lingkungan. untuk mewujudkannya adalah dengan pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian lingkungan. untuk itu, diperlukan pemahaman tentang konsep ekosistem, asas ekologi atau lingkungan, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Perlu diperhatikan bahwa pelestarian lingkungan hidup mengandung dua pengertian, yaitu: Yang dilestarikan adalah fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Suatu lingkungan bisa saja berubah karena adanya pembangunan, tetapi fungsi lingkungan itu tetap dipertahankan. Misalnya, suatu areal yang ditumbuhi pohon-pohonan akan dibangun menjadi kawasan industri. Pohon boleh ditebang, tetapi dalam perencanaan harus disediakan areal terbuka dan lokasi untuk tanaman penghijauan.

Dalam hal ini, fungsi pohon-pohonan yang ditebang menjelang pembangunan, diganti oleh areal terbuka dan pohon tanaman penghijauan setelah proyek berjalan. Yang dilestarikan adalah lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh adalah keberadaan hutan lindung, Taman Nasional, dan Cagar Alam, yang harus tetap dipertahankan (tidak boleh diganggu). Artinya, kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan di lingkungan itu karena fungsinya tidak mungkin dilestarikan dengan adanya kegiatan pembangunan. Pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-Undang

ini berisi tentang rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Upaya ini dilakukan agar kekayaan sumber daya alam yang ada dapat berlanjut selama adanya kehidupan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah mengatur sanksi dan denda bagi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan pada Pasal 41 yang berbunyi :⁴⁷

- 1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara ditetapkan di Gedung Tataan pada Tanggal 07 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 08 Desember 2011 pada masa kepemimpinan Bupati Aris Sandi

⁴⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 41 ayat 1 dan 2.

Darma Putra. Peraturan daerah ini dibuat dengan maksud dan tujuan yang tertuang pada Bab II pasal 2 yang berbunyi :⁴⁸

1. Maksud pengelolaan mineral memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan mineral di Kabupaten.
2. Tujuan pengelolaan mineral di Daerah adalah :
 - a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
 - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - c. Menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi :⁴⁹

1. Perencanaan WP (wilayah pertambangan);

⁴⁸Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2.

⁴⁹Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 3.

2. Penetapan WIUP (wilayah ijin usaha pertambangan) dan/ atau WPR (wilayah pertambangan rakyat);
3. Pengelolaan Data dan Informasi;
4. Pemberian dan penciptaan WIUP (wilayah ijin usaha pertambangan);
5. Pemberian IUP (izin usaha pertambangan) dan IPR (izin pertambangan rakyat);
6. Pemberian IUJP (izin usaha jasa pertambangan);
7. Hak dan Kewajiban;
8. Pendapatan Daerah;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Reklamasi dan Pascatambang;
11. Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan penggolongan komoditas tambang dalam Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara digolongkan menjadi 4 bagian yaitu:⁵⁰

1. Mineral logal meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit,

⁵⁰Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 5.

khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zirconium;

2. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

3. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onil, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral dan logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

4. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bab XII mengatur dengan jelas mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 121 yang berbunyi:⁵¹

1. Pasal 112 mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi 4 bagian :
 - a. Pertambangan mineral dan logam;
 - b. Pertambangan mineral bukan logam;
 - c. Pertambangan batuan; dan /atau
 - d. Pertambangan batubara.
2. Pasal 113 mengatur bahwasanya Usaha Pertambangan Rakyat dilarang pada wilayah tertutup untuk kepentingan umum, tempat-tempat pemakaman, wilayah yang dianggap suci, tempat wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara lain.
3. Pasal 114 mengatur tentang pemberian izin pertambangan rakyat yaitu:
 - a. Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.
 - b. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati.
 - c. IPR diberikan setelah ditetapkan WPR (wilayah pertambangan rakyat) oleh bupati.

⁵¹Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 112-Pasal 121.

d. Dalam 1 (satu) WPR (wilayah pertambangan rakyat) dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

4. Pasal 115 mengatur tentang tata cara untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pasal 144 ayat (1) pemohon harus memenuhi:

- a. Persyaratan Administratif;
- b. Persyaratan Teknis, dan
- c. Persyaratan Finansial.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk orang perseorangan, paling sedikit meliputi:

- a. Surat Permohonan;
- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. Komoditas tambang yang dimohon;
- d. Izin lingkungan dari masyarakat sekitar;
- e. Surat rekomendasi desa setempat;
- f. Surat rekomendasi camat setempat;
- g. Dokumen lingkungan;
- h. Surat kepemilikan atas tanah/surat pernyataan dari pemilik tanah;
- i. Menyampaikan hasil uji laboratorium untuk komoditas mineral logam dan mineral bukan logam.

Selanjutnya persyaratan administratif untuk kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:

- a. Surat Permohonan;
- b. Kartu Tanda Penduduk;

- c. Komoditas tambang yang dimohon;
- d. Berita acara pembentukan kelompok masyarakat yang diketahui oleh kepala desa setempat;
- e. Izin lingkungan dari masyarakat sekitar;
- f. Surat rekomendasi desa setempat;
- g. Surat rekomendasi camat setempat;
- h. Dokumen lingkungan;
- i. Surat kepemilikan atas tanah/surat pernyataan dari pemilik tanah;
- j. Menyampaikan hasil uji laboratorium untuk komoditas mineral logam dan mineral bukan logam.

Selanjutnya persyaratan administratif untuk koperasi setempat, paling sedikit meliputi:

- a. Surat Permohonan;
- b. Nomor Pokok Pajak;
- c. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Komoditas tambang yang dimohon; dan
- e. Berita acara pembentukan kelompok masyarakat yang diketahui oleh kepala desa setempat;
- f. Izin lingkungan dari masyarakat sekitar;
- g. Surat rekomendasi desa setempat;
- h. Surat rekomendasi camat setempat;
- i. Dokumen lingkungan;

- j. Surat kepemilikan atas tanah/surat pernyataan dari pemilik tanah;
- k. Menyampaikan hasil uji laboratorium untuk komoditas mineral logam dan mineral bukan logam.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

- 5. Pasal 116 mengatur tentang luas wilayah dan jangka waktu yang diberikan untuk 1 (satu) IPR yaitu:
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) Ha;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; dan/atau
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) Ha.

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing-masing 3 (tiga) tahun.

6. Pasal 117 mengatur bahwasanya:

- a. IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam dan batubara disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi dalam 1 (satu) WIPR (wilayah izin pertambangan rakyat).
- b. Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- c. Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut,
- e. Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- f. IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

7. Pasal 118 menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemegang IPR yaitu:

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah;

- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IPR selain memiliki hak, para pemegang IPR mempunyai kewajiban yang harus di jalankan yaitu:

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat tiga (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-indangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. Membayar iuran tetap, iuran produksi dan/atau pajak retribusi daerah;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Selain kewajiban diatas pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyran teknis pertambangan.

- 8. Pasal 120 menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah terhadap pemegang IPR yaitu:
 - a. Pemerintah kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta pemodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

b. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan usaha pertambangan rakyat yang meliputi:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 2) Pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 3) Pascatambang.

c. Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemerintah kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Bupati dan Menteri.

9. Pasal 121 mengatur tentang berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat sebagai berikut:

a. Izin Pertambangan Rakyat berakhir karena:

- 1) Dikembalikan;
- 2) Dicabut;
- 3) Habis masa berlakunya.

b. Izin Pertambangan Rakyat yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibanya,

c. Izin Pertambangan Rakyat dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- 1) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Pertambangan Rakyat serta peraturan perundang-undangan;
- 2) Pemegang IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini; atau
- 3) Pemegang IPR dinyatakan pailit.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bab XIX mengatur tentang Ketentuan Administrasi pada Pasal 152 sampai Pasal 155 yang berbunyi:⁵²

1. Pasal 152 memuat peraturan yang mengenai ketentuan administrasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yaitu:
 - a. Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 24 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 57, Pasal 63 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (2), Pasal 78 ayat (3), Pasal 81 ayat (1), Pasal 104 ayat (2), Pasal 95, Pasal 104 ayat (1), pasal 105 Ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 108, Pasal 109, Pasal 125 ayat (1), Pasal 148, Pasal 149 ayat (1).

⁵²Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 52-Pasal 155.

- b. Bupati memberikan sanksi administratif kepada Pejabat Dinas apabila dalam melakukan kajian teknis tidak didasarkan pada data faktual lapangan.
 - c. Bupati memberikan sanksi administratif kepada Inspektur Tambang apabila bertindak sewenang-wenang dan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melakukan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara.
2. Pasal 153 mengatur tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (1) yang berupa:
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produk; dan/atau
 - c. Pencabutan IUP, dan IPR
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 152 ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pasal 154 menerangkan bahwa pemegang IUP atau IPR setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan.
4. Pasal 155 menerangkan bahwa Bupati dapat mencabut perizinan usaha pertambangan, apabila pemegang IUP atau IPR setelah diberikan teguran tertulis dan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 154 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memperbaiki kesalahannya atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bab XX mengatur tentang Ketentuan Pidana yang termuat dalam Pasal 156 yaitu:⁵³

1. Setiap orang atau badan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 73, Pasal 123 ayat 93) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Terhadap tindak pidana selain yang diatur pada ayat (1), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kejahatan.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sudah diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 yang berbunyi :⁵⁴

⁵³Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 156.

⁵⁴Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 157-Pasal 158.

1. Pasal 157 menjelaskan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP dan IPR diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 158 menerangkan bahwa segala akibat yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 ayat (3), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk kembali kepada Pasal 156 terhadap ketentuan pidana pada ayat (1) dapat dilihat bahwa mengenai Izin Pertambangan Rakyat belum diatur di dalam Pasal 156 ayat (1), tetapi dalam Pasal 156 ayat (3) dijelaskan bahwa tindak pidana selain yang diatur pada ayat (1), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 156 ayat (4) bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (3) adalah tindakan kejahatan. Dalam hal ini kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 158 yang berbunyi:⁵⁵

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara *paling lama* 10 Tahun dan denda paling banyak rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”

⁵⁵Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158.

B. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada judul karya ilmiah yang serupa dengan judul skripsi ini akan tetapi ada karya ilmiah yang membahas permasalahan yang hampir serupa pernah ditemukan, diantaranya :

1. Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya mineral di daerah (studi pada implementasi perda nomor 11 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Tulung Agung, karya Andri Manggala Yuda, Jurnal Administrasi publik, Universitas Brawijaya, 2010) pokok bahasan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Sumber daya Mineral di daerah, khususnya di Kabupaten Tulung Agung, Implementasi kebijakan yang ada telah sesuai dengan perda Nomor 11 tahun 2010 tentang pengelolaan pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan dalam perda ini telah sesuai standar kebijakan, tidak ada pertentangan masyarakat, dan menguntungkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun pengelola pertambangan di Kabupaten Tulung Agung. Namun, pihak Perda Nomor 11 Tahun 2010 masih belum terlaksana baik dan diharapkan adanya perubahan dalam perda baru yang akan dibuat. Faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara terdiri dari faktor penghambat, antara lain informasi, kondisi sosial dan budaya.⁵⁶

⁵⁶Andri Manggala Yuda, "Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya mineral di daerah (studi pada implementasi perda nomor 11 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Tulung Agung)"(Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, 2010).

2. Implementasi perda nomor 10 tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Boyolali, karya Bayu Pratama Aji, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta, 2017. Bertujuan memahami dan mencermati implementasi, faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 untuk kemudian dicarikan solusi terbaik, serta mengetahui dan memberikan rekomendasi terkait upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali akibat proses penambangan pasir di Desa Klakah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 telah berjalan dengan baik. Secara umum, dengan adanya kebijakan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah. Pelaksanaan kebijakan pertambangan pertambangan melibatkan beberapa implementor kebijakan melalui dukungan komunikasi dan koordinasi, berdasarkan kekuasaan, kepentingan, dan karakteristik yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Desa Klakah. Hambatan/kendala yang muncul dalam implementasi adalah proses penertiban lokasi tambang, rendahnya keserasan dari sebagian masyarakat penambang Desa Klakah dari pentingnya penambangan yang berwawasan lingkungan. Proses pengawasan lokasi-lokasi tambang yang ada di

Kabupaten Boyolali serta usaha reklamasi lahan pasca tambang di Desa Klakah. Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan yaitu dengan penanaman pohon atau reboisasi di kawasan hulu sungai Apu dan melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual serta pemasangan papan kawasan taman nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di wilayah Desa Klakah.⁵⁷

3. Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam, Karya M.Fuad Budairi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019). Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi pengawasan yang dilakukan lembaga yang berwenang terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini juga berusaha mengetahui apakah para penambang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Menurut Hukum Islam, sekaligus apa tindakan lembaga yang berwenang apabila adanya ketidaksesuaian para penambang dengan peraturan dan hukum Islam tersebut. Hasil penelitian ini : pertama, Banyak ketidaksesuaian pengimplementasian Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dalam persyaratan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh penambang di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung dan kurang

⁵⁷Bayu Pratama Aji, "Implementasi perda nomor 10 tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Boyolali"(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi, Negara Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017).

efektifnya pengawasan yang dilakukan lembaga berwenang. Kedua, Pandangan Hukum Islam pada Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Berantas Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan tujuan Islam yaitu pertambangan yang mensejahterakan rakyatnya yang tidak sesuai dengan konsep/ masalah mursalah.⁵⁸

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian yang lainnya. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama mengkaji Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Mineral dan Batu bara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah di dalam penelitian ini secara khusus mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pengelolaan Mineral dan Batu bara menggunakan analisis fiqih siyasah yang dikaji secara mendalam.

⁵⁸M.Fuad Budairi, "Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam)" (Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Almumayyaz, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama, *AL-Quran dan Terjemahan*, Bandung: CV. Dipenogoro, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Dr. Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Drs. Kaelani, HD, MA, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Hadi S. Alikodra, *Konservasi SumberDaya Alam dan Lingkungan*, Jakarta: Prenamedia, 2012.
- Hs, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2012.

Khairuddin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Aneka Printing Metro, 2004.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Koes. Irianto, *Ekologi Kesehatan (Health Ecology)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Kus Dwiyoatmo B, *Pencemaran lingkungan dan Penanganannya*, Jakarta: Prenamedia, 2010.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001.

Munawwir Sjadjali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.

Nana Sudjana, *Prosedur Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 2001.

Noor D, *Pengantar Geologi*, Bogor: Universitas Pakuan, 2008.

Pande Made Kutanegara, *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004.

Prof.H.A.Djajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.

Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.

Syekh Abdul, Wahab, Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rinika Cipta, 1993.

The Liang Gie, *Kamus Administrasi*, Jakarta: Guwnung Agung, 1978.

V. Wiratna Sujrweni, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka barupress. 2014.

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islam*, Damsyiq: Dar Al Fikr, 2005.

Yosef Anata Christie, *“Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktifitas Pembangunan Perumahan”*, Jakarta : Gramedia, 2013.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 5.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 112-Pasal 121.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 52-Pasal 155.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 156.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 157-Pasal 158.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 Ayat 15.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 41 Pasal 1 dan 2.

Jurnal

Bayu Pratama Aji, “Implementasi perda nomor 10 tahun 2011 tentang pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Boyolali”(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi, Negara Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017).

Andri Manggala Yuda, “Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya mineral di daerah (studi pada implementasi perda nomor 11 tahun 2011

tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Tulung Agung”(Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, 2010).

M.Fuad Budairi, “Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam)” (Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

Wawancara

Andalan, Anggota Kelompok Penambang Batu Sungai di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Wawancara dengan penulis, 02 Oktober 2020.

Edi Rohyat, Anggota Kelompok Penambang Batu Sungai di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Wawancara dengan penulis, 03 Oktober 2020.

Gunawan, Anggota Kelompok Penambang Batu Sungai di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Wawancara dengan penulis, 01 Oktober 2020.

Hendri Kurniawan, Kepala Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Wawancara dengan penulis, 30 September 2020.

Irdiansyah, Kasi Pemerintahan Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Wawancara dengan penulis, 30 September 2020.

Layang Rembo, Ketua Kelompok Penambang Batu Sungai di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Wawancara dengan penulis, 01 Oktober 2020.

Muzaini, Anggota Kelompok Penambang Batu Sungai di Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Wawancara dengan penulis, 02 Oktober 2020.

Riswandar, Sekretaris Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Wawancara dengan penulis, 30 September 2020.

Sumber On-line

TafsirQ, “*Hadist Bukhori Nomor 6617*” (On-line) Tersedia di: <https://tafsirq.com/en/hadits/bukhari/6617> (29 September 2020).